

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN TEORI AGENSI (STUDI PADA OPD SE-EKS KARESIDENAN PATI)

Tuti Susanti¹, Zamrud Mirah Delima²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus

¹tutisanti3396@gmail.com

²mirah.delima@umk.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah se-eks karesidenan Pati.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 34 OPD se-eks Karesidenan Pati. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jumlah responden yang dipilih sebanyak 60 sebagai sampel penelitian yang memenuhi kriteria masa kerja lebih dari 5 tahun dan terlibat langsung dalam proses pembuatan laporan keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan analisis data seperti linear berganda dan menggunakan bantuan spss versi 23 for windows.

Hasil uji statistik secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa, pengaruh pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan hasil uji t (uji *partial*) menunjukkan bahwa pengawasan internal, Pemahaman sistem akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi Informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pengawasan internal, pemahaman system akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci : *Pengawasan internal, sistem akuntansi keuangan (SAK), pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas laporan keuangan.*

I. PENDAHULUAN

Otonomi Daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan adanya sistem otonomi daerah maka daerah tersebut mempunyai hak untuk mengatur sendiri pemerintahannya, akan tetapi masih dalam pengawasan pemerintahan pusat dan sesuai undang-undang yang berlaku.

Kebijakan pemerintah pusat mengenai pemberlakuan otonomi daerah merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan pemerintahan dari sentralistik menuju desentralistik yang sesungguhnya, dengan maksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam mencapai tujuan nasional, Untuk itu diperlukan prinsip-prinsip penyelenggara pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa kriteria kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan Pemerintah mempunyai nilai atau manfaat sebagaimana disebutkan dalam kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari: (1) Relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas bagi pemakainya. Untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas bagi pemakainya maka diperlukan adanya pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan dalam menyusun laporan keuangan, sementara berdasarkan opini audit yang hanya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) oleh BPK salah satunya adalah Kabupaten Rembang, sementara daerah yang berhasil mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), antara lain Kabupaten Pati, Kudus, Jepara, dan Blora. (<http://www.m.solopos.com>).

Belum diperolehnya opini wajar dengan pengecualian (WTP) dari BPK RI, disebabkan oleh berberapa faktor antara lain (1) kelemahan sistem pengendalian intern; (2) barang milik Negara/daerah belum tertata dengan tertib; (3) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP); dan (5) kompetensi SDM pengelola keuangan masih kurang memadai. (<http://www.bpkp.go.id>)

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah, dkk (2016), yang berjudul Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor DPPKAD Kabupaten Boyolali). Adapun perbedaan dari

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah, dkk (2016) yaitu, dengan adanya penambahan variabel pemanfaatan teknologi informasi yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan perluasan objek penelitian, dimana peneliti menambahkan objek penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Eks Karesidenan Pati yang meliputi Kabupaten Pati, Kudus, Jepara, Blora dan Rembang.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor- faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan berdasarkan teori agensi (Studi pada OPD Se-Eks Karesidenan Pati)”**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: Sejauhmana pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Se-Eks Karesidenan Pati

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada OPD Se-Eks Karesidenan Pati.

II. TINJAUAN PUSATAKA

Teori Agensi

Jensen dan Meckling mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara satu orang atau lebih pemilik (*principal*) yang menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan berberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen.

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan, menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas, yaitu: 1) Relevan 2) Andal 3) Dapat dibandingkan 4) Dapat Dipahami.

Pengawasan internal

Pengawasan menurut keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal 16 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*),

Pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pegawai pemerintahan yang berperan sebagai (*principal*) sedangkan Pemerintah berperan sebagai (agen). Pengawasan internal dilakukan oleh pegawai pada Pemerintahan yang berperan sebagai pihak yang menyelenggarakan pelayanan publik yang memiliki informasi yang lebih banyak sehingga dapat membuat keputusan atau kebijakan dalam Pemerintahan. Dengan adanya pengawasan internal yang baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih berkualitas.

Berdasarkan penelitian Sholikah, dkk (2016) membuktikan secara empiris bahwa pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Sehingga peneliti ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara pengawasan internal dengan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), kualitas laporan keuangan dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*). Berdasarkan uraian diatas dapat diasumsikan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pengelompokan sistem mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan daerah sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Pendapat ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholikah, dkk (2016) menyatakan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang baik.

H2: Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Indonesia yakni, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, berarti Pemerintah Daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), kualitas laporan keuangan dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*). Berdasarkan uraian tersebut dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah harus diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri serta peningkatan kemakmuran yang merata bagi masyarakat (*principal*). Dalam penelitian Risdhayanti, dkk (2016) megatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan pada kantor DPPKAD Kabupaten Boyolali, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik mekanisme pengelolaan keuangan daerah maka kualitas yang dihasilkan dalam laporan keuangan daerah semakin tinggi. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3: Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Jogiyanto (1995:7), teknologi merupakan alat yang digunakan individual dalam penyelesaian tugas mereka, dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras,

perangkat lunak, data) dan penggunaan jasa pendukung (*training*) yang memberikan panduan penggunaan dalam menyelesaikan tugas.

Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), kualitas laporan keuangan dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*). Berdasarkan uraian diatas dapat diasumsikan bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya tentu akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas bagi pihak pemberi amanah.

Pendapat ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang Yoni Rahayu, dkk (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin maju dan canggih teknologi yang digunakan maka kualitas laporan yang dihasilkan semakin baik. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4: Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pengelolaan unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah Se-Eks Karesidenan Pati yang berjumlah 171 OPD, Yang meliputi Kudus 34, Pati 51, Rembang 37, Blora 23, dan Jepara 26. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut:

Kepala dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan satu pegawai keuangan yang sudah bekerja minimal 5 tahun dalam OPD tersebut.

Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden yang bekerja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Karesidenan Pati.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah kepala dan satu pegawai bagian keuangan pada organisasi perangkat daerah se-Eks Karesidenan Pati. Berdasarkan ijin penelitian dari

Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten se- Eks Karesidenan Pati didapatkan 34 organisasi perangkat daerah. Berdasarkan pengiriman kuesioner kepada kepala dan bagian keuangan OPD se-Eks Karesidenan Pati sebanyak 68, maka diperoleh angket sebanyak 63. Setelah melalui pengecekan terdapat 3 kuesioner tidak dapat digunakan karena kurang lengkap pengisiannya, sehingga hanya 60 kuesioner yang bisa digunakan.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yang dapat dilihat dari nilai rata – rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. (Ghozali, 2013:52) dikatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel.

Dari uji validitas diketahui bahwa masing-masing item yang menyusun masing-masing kuesioner memiliki r hitung $>$ r table (r hitung $>$ 0,2542), yang berarti masing-masing item dari variabel adalah valid. Dengan demikian syarat validitas dari alat ukur terpenuhi.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. (Ghozali, 2013:47). pengujian Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $>$ 0.70 (Nunnally, 1994).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi terdapat suata data penelitian yang menyimpang.

Uji Multikolinieritas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel bebas yang satu dengan yang lainnya. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance atau nilai VIF dengan asumsi jika nilai tolerance $>$ 0,1 dan nilai VIF $<$ 10 maka tidak terjadi gejala multikolonieritas.

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pengawasan Internal	0,568	1,760	Bebas multikolinieritas
Pemahaman Sistem Akuntansi	0,318	3,145	Bebas multikolinieritas

Kuangan			
Pengelolaan Keuangan Daerah	0,330	3,029	Bebas multikolinieritas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,693	1,444	Bebas multikolinieritas

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Uji Heteroskedastisitas (Uji Glesjer)

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan *uji glesjer*. Dengan asumsi apabila variabel bebas tidak berpengaruh terhadap nilai absolute residual ($\text{sig} > 0,05$) maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Variabel	B	Sig	Keterangan
Pengawasan Internal	-0.006	0.936	Bebas heteroskedastisitas
Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan	0.033	0.695	Bebas heteroskedastisitas
Pengelolaan Keuangan Daerah	-0.174	0.351	Bebas heteroskedastisitas
Pemanfaatan Teknologi Informatika	-0.091	0.334	Bebas heteroskedastisitas
Dependent: AbsRes			

Sumber: hasil SPSS 23 yang diolah, 2018

Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal.



Hasil pengujian normalitas dengan uji grafik normal *probability plot* menunjukkan penyebaran titik-titik disekitar garis tengah diagonalnya dan mengikuti arah garis

diagonalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal dan model regresi memenuhi syarat uji normalitas.

Pengujian Regresi

Model statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi berganda. Regresi berganda digunakan untuk memprediksi perubahan variasi kualitas laporan keuangan yang dilihat dari perubahan pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	1.048	4.356	
PI	0.253	0.118	0.211
PSAK	0.319	.0131	0.322
Pengelolaan Keuangan Daerah	0.618	0.291	0.274
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.331	0.146	0.202

$$Y = 1,048 + 0,253 X_1 + 0,319 X_2 + 0,618 X_3 + 0,331 X_4 + e$$

Koefisien Determinasi

Digunakan untuk melihat seberapa jauh variabel lain mempengaruhi variabel dependen di luar model.

R	R Square	Adjusted R Square
0,835	0,696	0,674

Sumber: hasil SPSS yang diolah, 2018

Uji F

Uji F seringkali juga dinamakan dengan *analysis of variance*. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Hasil pengolahan SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji F (Anova)

	<i>Sum of Squares</i>	Df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.	Keterangan
Regression	1228.949	4	307.237	31.547	0.000	Signifikan
Residual	535.651	55	9.739			
Total	1764.600	59				

Sumber: hasil SPSS yang diolah, 2018

Uji Partial (Uji t)

Dalam uji parsial ini ingin diketahui pengaruh dari masing-masing variable bebas terhadap variable terikat. Dalam pengujian parsial ini digunakan uji t. Hasil pengolahan SPSS sebagaimana berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji t (Partial)

Variabel	B	t hitung	Sig	Keterangan
Pengawasan Internal	0.253	2.143	0.037	Signifikan (H ₁ diterima)
Pemahaman Sistem AK	0.319	2.443	0.018	Signifikan (H ₂ diterima)
Pengelolaan Keuangan D	0.618	2.120	0.039	Signifikan (H ₃ diterima)
Pemanfaatan TI	0.331	2.264	0.028	Signifikan (H ₄ diterima)

Sumber: hasil SPSS yang diolah, 2018

Pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD se eks-Karesidenan Pati. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,253 dengan signifikansi 0,037. Ini berarti bahwa meningkatnya pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan di dalam lingkungan organisasi bersangkutan maka semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Kemampuan pengawasan internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan ditunjukkan hasil nilai rata-rata angket pengawasan internal sebesar 39,90 dengan standar deviasi 4,57 yang mengindikasikan adanya penyimpangan terkecil sebesar 35,33 dan terbesar sebesar 44,47. Jarak ini menunjukkan kesetujuan responden akan adanya pengawasan internal yang ditunjukkan oleh adanya lingkungan pengendalian, penaksir risiko, aktivitas pengendalian fisik, informasi dan komunikasi dan juga pemantauan di tiap lingkungan OPD. Adanya indikator - indikator ini menunjukkan tingginya tingkat pengawasan yang dilakukan pada tiap OPD yang berdampak terhadap kecilnya

penyelewengan atau penyimpangan yang mungkin akan atau sedang dilakukan oleh individu atau badan. Adanya pengawasan internal maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada di bawah kendali sehingga tujuan akan tercapai, risiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Dengan adanya pengawasan internal mampu menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas (tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap), dan dapat diaudit.

Pengaruh pemahaman sistem akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD se-Eks Karesidenan Pati. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,319 dengan signifikansi 0,018. Ini berarti bahwa meningkatnya kemampuan memahami dan mengerti tentang sistem informasi keuangan maka semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Kemampuan pemahaman sistem akuntansi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan ditunjukkan hasil nilai rata-rata angket pemahaman sistem akuntansi sebesar 41,40 dengan standar deviasi 5,52 yang mengindikasikan adanya penyimpangan terkecil sebesar 35,88 sampai dengan 46,92 yang menunjukkan kesetujuan responden bahwa pemahaman terhadap sistem akuntansi keuangan yang ditunjukkan oleh pemahaman akan prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi asset tetap, prosedur akuntansi selain kas dan prosedur penyajian laporan keuangan. Adanya indikator-indikator ini menunjukkan tingginya tingkat pemahaman dan penguasaan pegawai atas sistem informasi yang diterapkan dalam OPD. Dengan memahami sistem akuntansi, pegawai akan lebih mudah menggunakan dan melaporkan keuangan. Adanya pelaporan yang dilakukan oleh OPD, membuat adanya transparansi penggunaan keuangan membuat kecurangan dan penyelewengan terhadap penggunaan dana lebih kecil. Transparansi akan berdampak akuntabilitas dalam pelaporan yang membuat laporan keuangan lebih berkualitas.

Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD se-Eks Karesidenan Pati. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,618 dengan signifikansi 0,039. Ini berarti bahwa meningkatnya kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah maka semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Kemampuan pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan ditunjukkan hasil nilai rata-rata angket pengelolaan keuangan daerah sebesar 20,93 dengan standar deviasi 2,43 yang mengindikasikan adanya penyimpangan terkecil sebesar 18,51, sampai dengan 23,36 yang menunjukkan kesetujuan responden bahwa pengelolaan

keuangan daerah yang dilakukan ditunjukkan oleh adanya perencanaan oleh bagian anggaran, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan dalam sistem akuntansi, adanya penatausahaan laporan melalui pemeriksaan audit internal maupun eksternal, pertanggungjawaban terhadap pemakaian keuangan dan adanya pemeriksaan secara fisik dan administratif terhadap aset. Adanya indikator-indikator ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan di OPD telah mengacu pada Permendagri No 21 tahun 2011. Adanya pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Permendagri No 21 Tahun 2011 menunjukkan kepatuhan daerah terhadap peraturan perundang - undangan terhadap pengelolaan keuangan. Dengan mematuhi peraturan perundang-undangan keuangan daerah akan lebih transparan dalam penggunaan sehingga akan tercapai tujuan yang diharapkan. Adanya transparansi dalam penggunaan keuangan membuat kecurangan dan penyelewengan terhadap penggunaan dana lebih kecil. Transparansi akan berdampak akuntabilitas dalam pelaporan yang membuat laporan keuangan lebih berkualitas.

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD se-Eks Karesidenan Pati. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,331 dengan signifikansi 0,028. Ini berarti bahwa meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah maka semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Kemampuan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan ditunjukkan hasil nilai rata-rata angket pemanfaatan teknologi informasi sebesar 28,50 dengan standar deviasi 3,34 yang mengindikasikan adanya penyimpangan terkecil sebesar 25,16, sampai dengan 31,84 yang menunjukkan kesetujuan responden bahwa pemanfaatan teknologi informasi ditunjukkan oleh adanya software aplikasi keuangan yang digunakan, proses akuntansi dilakukan secara komputerisasi, pengolahan data transaksi menggunakan software yang sesuai peraturan dan perundang-undangan, laporan yang dihasilkan melalui sistem integrasi dan adanya pemeliharaan peralatan teknologi informasi. Adanya indikator-indikator ini menunjukkan bahwa tingginya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data keuangan menyebabkan terjadinya efektifitas, efisiensi serta ketepatan dalam pelaporan

keuangan. Hal ini terjadi karena dengan pemanfaatan teknologi informasi, maka waktu pengerjaan akan semakin cepat, serta memudahkan dengan hasil yang akurat. Hal ini terjadi karena teknologi informasi dibuat untuk membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Sebagaimana diketahui bahwa teknologi informasi selain digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi berfungsi juga sebagai penyebaran informasi. Adanya keunggulan dari teknologi informasi ini menyebabkan laporan keuangan yang diolah oleh teknologi informasi akan semakin berkualitas, dikarenakan kecepatan dan keakuratan dalam mengolah dan menganalisis serta kemudahan masyarakat dalam mengakses laporan keuangan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan atas dasar hasil pengujian hipotesis maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Eks Karesidenan Pati. Sedangkan Pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi secara individu (*partial*) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Se-Eks Karesidenan Pati.

Saran

Berdasarkan keterbatasan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi peneliti berikutnya agar dapat menambah variabel - variabel lain yang kemungkinan bisa menjadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan seperti kapasitas sumber daya manusia, motivasi kerja dan lain sebagainya. Dengan adanya kapasitas sumber daya yang mumpuni, menyebabkan individu akan mengetahui, memahami dan mengerti mengenai seluk beluk penggunaan maupun pelaporan keuangan daerah. Sedangkan adanya motivasi kerja dapat meningkatkan kinerja pegawai di suatu instansi Organisasi perangkat daerah tersebut.
2. Diharapkan penelitian berikutnya dapat dilengkapi metode survei untuk wawancara guna meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan, dan mengurangi subjektivitas responden yang bisa mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasanya jawaban responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens *et. al.* 2012. *Auditing and Assurance Services: An Intregrated Approach-An Indonesia Adaption*. Fourteen Edition: Pearson Pretice Hall.
- Arfianti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Semarang: FakultasEkonomi Universitas Diponegoro. Skripsi.
- Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI (2001:1) Tentang Sistem Akuntansi Keuangan.
- Bastian, Indra dan Gatot Soepriyanto. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik: konsep untuk pemerintahan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2009. *Akuntansi Sektor public di Indonesia edisi pertama*. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta.
- Dewi Ni Made Rika Krisna, Ni Kadek Sinarwati, dan Nyoman Ari Surya Dermawan. 2014. Pengaruh Pemahaman Sistem akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada 10 SKPD Berupa Dinas di Kabupaten Jembrana). *E-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha (Volume 2 No.1 Tahun 2014)*.
- Efendi Loli, Darwanis, dan Syukriy Abdullah. 2017. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. (Volume 3 Nomor 2, September 2017 ISSN. 2502-6976).
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Bandung: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. 2003. *Basic Econometrics*. Mc-Grawhill. New York.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen, Michael C. and William H. Meckling. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*. (V. 3, No. 4, pp. 305-360 October, 1976).
- Jogiyanto HM. 2008. *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: ANDI
- Jurnali, T. & B. Sopomo. (2002). Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas- Teknologi dan Pemanfaatan TI Terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. 5 (2), 2014-228.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah – Buku 1*. Semarang: CV Widya Karya Semarang.
- Kuansa, Nadirsyah, dan Syukriy Abdullah. 2016. Pengaruh Kompetensi Pejabat Pengelolaan Keuangan, Regulasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap kualitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
- Kartika Juliani Cahya, Eddy Budiono, dan QIA. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Akuntansi Instansi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia). *E-Proceeding of Management*. (Vol.2, No.3 Desember 2015).
- Kanzunudin, Mohammad. 2015. *Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*: Kudus: Yayasan Adhigama.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor publik*. Yogyakarta: ANDI.

- Nasir, Azwir dan Ranti Oktari.2011. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Ekonomi*. Volume 19 No 02.
- Nazrin, Putra Mhd. 2017. Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kota Bukittinggi). *JOM Fekon*, (Vol. 4 No. 1).
- Nunnally, Bernsstein, IH. 1994. *Psychometric Theory*. Edisi 3. New York: McGraw-Hill.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan Indonesia.
- Ponamon Irene Fransisca. 2014. Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Volume 9, no.2 Juni 2-14, Hal 68-80.
- Rahayu Ni Komang Yoni, Ni Kadek Sinarwati, dan Made Arie Wahyuni. 2017. Analisis Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar. *E Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*. (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017).
- Rahmadani, Suci. 2015. Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Paman Barat). *Jom FEKON* (Vol. 2 No. 2 Oktober 2015).
- Rahyuda, I Ketut, IGW Murjana Yasa dan I Nyoman Yuliarmi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Denpasar: Universitas Udayana Press
- Republik Indonesia.1999. *Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Lembaran Negara RI 15 Juni 1999. Sekretariat Kabinet RI . Jakarta.
- Rusdiana, H. A. dan Irfan. 2014. *Sistem Informasi Manajemen*. Edisi ke-1. Pustaka Setia Bandung.
- Sholikhah Risdhayanti nur, Dewi Saptatinah Puji Astuti, dan Muhammad Rofiq Sunarko.2016. Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Boyolali).*Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. Vol. 12; (Edisi Khusus April 2016: 168-175).
- Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: SalembaEmpat.

- Sudjana. 2012. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Wilkinson, W.J.,M.J. Cerullo, V. Raval, & B. W. Wing. (2000). *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. Fourth Edition. John Wiley and Sons.Inc.
- Yosa. 2010. *Pengertian Pengawasan*. (Sumber. www.itjenkemdagri.go.id).
- Yuniatin Neni Yuheti, Noer Azam Ahasani, dan Hendro Sasongko. 2012. Pengaruh Perubahan Status, Employee Engagement, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. (Akreditasi No.80/DIKTI/Kep/201).